

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum dalam praktek berbangsa bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasari oleh kekuasaan saja. Dalam perumusan UUD 1945 dalam Amandemen ke-2 pada tahun 2000 telah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Keseimbangan dalam pengaturan urusan pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap meningkatkan pelayanan bermasyarakat disamping bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan tujuan desentralisasi.

Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia telah menjadi isu yang sangat menarik untuk diamati dan di kaji, dalam sistem kenegaraan yang menganut paham Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri yang dirumuskan dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Sejak kemerdekaan hingga saat ini distribusi kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah selalu

bergerak ke arah keseimbangan yang berbeda, perbedaan ini sangat jelas terlihat, dengan kata lain, bahwa pada suatu waktu bobot kekuasaan terletak pada Pemerintah Pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan pada kekuasaan pada Pemerintah Daerah¹.

Sejak berfungsinya gelombang reformasi dan mulai bergulirnya era otonomi daerah tahun 1999, otonomi daerah langsung menjadi topik perbincangan banyak kalangan, otonomi daerah menjadi wacana dan bahan kajian dari berbagai kalangan, baik Pemerintah, Lembaga Perwakilan Rakyat, kalangan akademisi, pelaku ekonomi dan kalangan awam, setelah di keluarkannya Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan secara eksplisit bahwa unit pemerintahan melaksanakan otonomi daerah adalah di tingkat kabupaten/kota.² Kepada daerah di berikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang di berikan tersebut mencakup seluruh kewenangan dibidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang tertentu yang masih di tangani oleh pemerintah pusat. Konsekuensi dari adanya pelimpahan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, diharapkan daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di samping bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan di daerahnya sesuai dengan tujuan desentralisasi.³

¹J. Kaloh, 2006, *Mencari Benak Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*, Rineka Cipta, hlm:1-2

²*ibid*: hlm 51

³Syofianti, *Op. Cit* , hlm 89

Pada dasarnya Otonomi Daerah bukanlah suatu hal yang baru, karena konsep pemerintahan yang dianut pada zaman awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah di terapkan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan oleh daerah/Otonomi Daerah sebagian telah di terapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada awal kemerdekaan sampai saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. Yang pertama, Undang-undang nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang memberikan hak otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang menganut sistem otonomi riil yang seluas-luasnya. Diikuti Undang-undang nomor 5 tahun 1974 yang menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 yang menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang kemudian yang disusul dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang berlandaskan dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan di tegaskan dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di ubah dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Untuk mencapai tujuan desentralisasi tersebut perlu adanya keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-

masing daerah dengan pendanaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pendanaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk uang dalam periode satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menjadi tolak ukur awal kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan kapabilitas dan efektifitas suatu daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memenuhi kas daerah sebagai sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah akan memaksimalkan pendapatan daerahnya khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Tuntutan akan peningkatan PAD semakin bertambah dengan seiring dengan meningkatnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan pegawai daerah, peralatan serta tuntutan akan pembangunan dan kesejahteraan daerah yang lebih dari masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapat dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa pajak daerah adalah pemungutan pemerintah daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah terhadap orang/badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan retribusi daerah dapat

diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari adanya kontra prestasi yang di berikan oleh pemerintah daerah yang berdasarkan pelayanan maupun pembayaran yang langsung dapat dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya berdasarkan atas peraturan yang berlaku.⁴

Pemberlakuan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah saja sebagai pihak yang menetapkan dan memungut Pajak dan Retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang di atur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi yang terutang. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memahami kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Restribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan yang sangat penting maka dalam pemungutan retribusi diperlukan aturan sebagai dasar hukum agar adanya kepastian hukum bagi pemungut retribusi daerah (Pemerintah Daerah) dalam melakukan pemungutannya.⁵ Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah pemerintah daerah telah melaksanakan pemungutan retribusi sejak awal kemerdekaan sampai saat

⁴ Josef rihu kaho, 2006, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm:170

sekarang.

Pengertian Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa dari Negara.⁶ atau merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan timbal balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut. Namun menurut Panitia Nasrun Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengganti atas UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah di bagi atas 3 (tiga), yaitu (i) Retribusi Jasa Umum; (ii) Retribusi Jasa Usaha; dan, (iii) Retribusi Perizinan Tertentu. Sedangkan Retribusi Pelayanan Kesehatan sendiri merupakan salah satu dari jenis retribusi yang di pungut oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Padang yang merupakan bagian dari golongan Retribusi Jasa Umum.

Undang-undang dasar 1945 juga mengankomodasi atau menjamin akan adanya perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat sesuai yang di

⁶*Ibid*;hlm170

⁷*Ibid*;hlm 170-171

cantumkan dalam pasal 28H yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang menandakan bahwa pemerintah pusat menyadari bahwa kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat yang di tandai dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka semakin berkembang juga aturan dan peranan hukum dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, alasan ini menjadi faktor pendorong pemerintah dan institusi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk menerapkan dasar dan peranan hukum dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap perlindungan dan kepastian hukum pasien.

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu komponen penting yang wajib ada di setiap daerah karena dalam kehidupan manusia selalu akan berhubungan dengan lingkungannya baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana manusia akan sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya, oleh karenanya diperlukan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sehingga tercapai keselarasan dan keseimbangan di dalamnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Sebagaimana kita ketahui kebersihan secara umum sangat menunjang terhadap kesehatan masyarakat, dengan demikian pencegahan terhadap gangguan kesehatan sangat di perlukan dan harus dilaksanakan sedini mungkin agar masyarakat dapat terhindar berbagai penyakit yang lebih berbahaya oleh karena itu fasilitas kesehatan harus di sediakan oleh pemerintah bahkan hingga pelosok

daerahnya. Dasar hukum pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu⁸:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 54 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

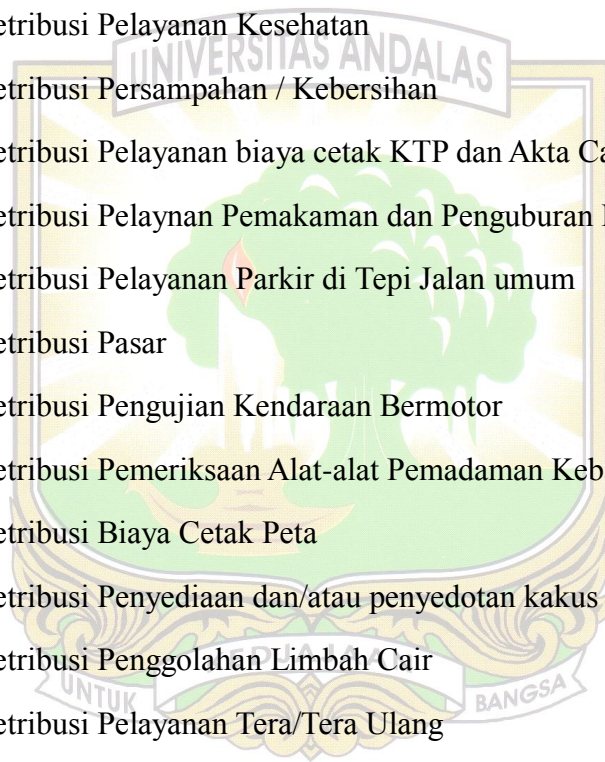
Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu obyek dalam retribusi

⁸<http://www.suduthukum.com/2015/09/dasar-hukum-pelayanan-kesehatan.html>

jasa umum dimana retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan serta yang dinikmati oleh orang pribadi.⁹

Berdasarkan Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum (Pasal 110)

- 
- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Persampahan / Kebersihan
 - c) Retribusi Pelayanan biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 - e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum
 - f) Retribusi Pasar
 - g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h) Retribusi Pemeriksaan Alat-alat Pemadaman Kebakaran
 - i) Retribusi Biaya Cetak Peta
 - j) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - m) Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
 - n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi ini berdasarkan peraturan yang berlaku yakni dalam bentuk peraturan daerah guna mentaati peraturan tersebut yang berkepentingan (pemerintah) dapat memaksakan (paksaan ekonomis) yaitu “Barang siapa yang

⁹Hadi Setia Tunggal, *Pajak dan Retribusi Daerah*, harvarindo, Jakarta, 1999, Hlm:4

ingin menggunakan atau mendapatkan jasa tertentu dari Negara maka ia wajib membayarnya”

Dalam upaya Pemerintah Kota Padang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Padang telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 dan dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang di pungut oleh dinas terkait kepada orang perorangan dan/atau badan yang memperoleh langsung jasa pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Padang dalam memaksimalkan PAD pemerintah kota sendiri. Dengan memaksimalkan potensi-potensi dari sumber penerimaan PAD sebagai salah satu faktor penunjuang suatu daerah dalam menunjukan suatu kemandirian dari suatu daerah sehingga mampu membiayai beban pembiayaan daerah baik dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah maupun pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar nasional. Salah satu dasar hukum Pemerintah Kota Padang dalam memungut Retribusi Pelayanan Kesehatan maka Pemerintah Kota Padang mengatur hal tersebut dalam Peraturan Daerah

Kota Padang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Sementara itu dari segi pelayanan kesehatan yang penulis kutip dari beberapa surat kabar elektronik www.gosumbar.com tertanggal 6 oktober 2015 disana sebutkan bahwa terdapat seorang pasien patah tulang akibat kecelakaan lebih memilih pulang karena menganggap tidak dilayanani dengan baik oleh pihak rumah sakit, kasus-kasus lain juga terdapat di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia dimana pasien BPJS Kesehatan yang tergolong tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang buruk dari rumah sakit dan tak banyak dari beberapa kasus tersebut mengakibatkan meninggalnya pasien dikarenakan pihak rumah sakit kehabisan stok obat hingga salah injeksi (suntik) yang dilakukan pihak rumah sakit yang mengakibatkan kehilangan nyawa, dan di beberapa kasus keluarga miskin yang menggunakan BPJS kesehatan harus menambah biaya belasan hingga puluhan juta baru mendapatkan pelayanan

kesehatan dari pihak rumah sakit yang mana biaya tersebut hanya untuk mendapatkan kamar yang telah dinyatakan penuh sebelumnya dari pihak rumah sakit. Padahal seharusnya yang terjadi ialah bahwa pasien peserta BPJS kesehatan harus mendapatkan pelayanan lebih dahulu tanpa memandang kekuatan ekonomi dari para pasien karena itu sudah merupakan kewajiban yang harus di berikan oleh pihak rumah sakit yang telah tercantum dalam UUD yang di perjelas dalam Undang-undang dan peserta BPJS kesehatan merupakan peserta yang sudah di erepungut terlebih dahulu iurannya melalui BPJS kesehatan.

Rumah sakit umum daerah Kota Padang yaitu Rumah Sakit dr. Rasidin yang berada di bawah pengelola oleh pemerintah daerah Kota Padang yang berada dalam kelas B yang artinya rumah sakit umum daerah yang dimiliki oleh kota padang mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan dokter spesialis yang terbatas, sementara itu fungsi utama dari retribusi pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Perda no 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan menyatakan bahwa retribusi yang di pungut dipergunakan untuk sarana dan prasarana di rumah sakit, dengan rata-rata pasien 3.248 pasien/tahun, pasien rawat jalan 36.140 orang/tahun dan 11.882 orang/tahun pasien UGD¹⁰, hal ini menandakan bahwa masyarakat kota padang sangat bergantung pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit dr.Rasidin.

¹⁰<http://rumah-sakit.findthebest.co.id/I/753/RSUD-Dr-Rasidin-Padang>

Pembayaran pungutan pelayanan kesehatan dapat dijadikan sebagai acuan awal baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan kepada rumah sakit, semakin baik pembayaran retribusi maka akan menjamin baiknya suatu pelayanan di rumah sakit, hal ini dikarenakan besaran jumlah retribusi akan di alokasikan sebagai perbaikan sarana dan prasarana dirumah sakit disamping adanya anggaran lain yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan rumah sakit tersebut. Pemungutan yang jumlah sangat besar tersebut dapat terjadi kecurangan atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan dirumah sakit tsb.

Maka dari sanalah perlu adanya transparansi dalam pengawasan retribusi pelayanan kesehatan yang di berikan rumah sakit di Kota Padang khususnya Rumah Sakit Daerah Dr. Rasidin yang dapat berperan penting dalam PAD Kota Padang, sebagai dasar dari suatu pertimbangan bahwa adanya peningkatan pelayanan yang di dapat oleh masyarakat yang ada di rumah sakit tersebut yang pengawasannya di lakukan oleh dinas terkait di Kota Padang.

Maka penulis tertarik membahas masalah dalam sebuah penulisan dengan judul **“PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. RASIDIN “.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang?
2. Bagaimana kendala yang di hadapi dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Padang di rumah Sakit Umum Daerah dr.

Rasidin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi Rumah Sakit Umum daerah dr. Rasidin Kota Padang dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat dirasakan manfaatnya baik bagi daripenulis sendiri maupun oleh masyarakat luas.

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum administrasi, khususnya mengenai peranan pemerintah, dan tanggungjawab para pihak dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

2. Praktis

Memberikan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang diangkat oleh penulis ini dan juga membuka mata dan pikiran masyarakat agar dapat di jadikan sebagai acuan dalam melakukan

pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yakni bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹¹ Dalam penelitian ini pendekatan mengacu kepada bagaimana pemungutan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Rasidin di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan secara jelas dan seteliti mungkin tentang pemungutan terhadap pengawasan pemungutan retribusi dan kendala yang ditemukan sesuai dengan penulis dapatkan dilapangan.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 31.

¹²Amirudin dan Zainal Assikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 25.

Jenis data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh langsung dari lapangan dan dari sumber pertama.¹³ Dalam penelitian ini data tersebut berupa hasil wawancara dan responden yakni subjek pelaku atau pelaku yang terkait dengan masalah ini yaitu kepada pihak-pihak pengawas terhadap Retribusi Daerah, pemungut retribusi dan pasien yang membayarkan retribusi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya.¹⁴ Yang menjadi data sekunder antara lain:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain.¹⁵

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah

¹³*Ibid*, hlm. 30.

¹⁴*Ibid*, hlm 31.

¹⁵*Ibid*, hlm 33.

4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 dan dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar dibidang hukum. Dalam melakukan penelitian ini sebagai bahan hukum sekundernya penulis menggunakan buku-buku, artikel maupun hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku yang terdapat di Perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dari buku-buku yang terdapat di Perpustakaan, data-data yang

digunakan dalam penelitian juga bersumber dari lapangan berupa wawancara.

5. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh keterangan lisan melalui Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang, Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang, pemungut retribusi, pengawasan maupun pasien yang membayarkan retribusi pelayanan kesehatan.

Wawancara yang dipakai adalah semi-terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah, dalam hal ini yang di wawancarai adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang, pemungut retribusi, pengawas maupun pasien yang membayarkan retribusi. Demikian dengan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi (*Purposive sampling*)¹⁶

b. Studi Dokumen

Dengan cara menghimpun bahan hukum yang diperlukan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta melakukan pencatatan dan pembuatan data yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat ahli tentang penulisan penelitian ini.

¹⁶Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 123

6. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka penulis akan memilih dan memperbaiki susunan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji ditahap akhir pengolahan data sehingga siap pakai untuk dianalisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data. Yuridis empiris adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, baik melalui hasil wawancara maupun hasil observasi.

